



## Soal Aset Hambat Raih WTP

**SAMBAS** - Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Sambas kini berusaha keras meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam hal penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait laporan keuangan daerah. Namun untuk memperoleh predikat tersebut, ternyata jalannya tak mudah. Penghalang besar Pemkab dalam hal ini adalah persoalan aset pemerintahan, yang melibatkan dua wilayah, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang dan Pemkab Bengkayang.

Hal ini terungkap dari diskusi dalam audiensi bersama Komite IV DPD RI dalam rapat kerja membahas materi tindak lanjut hasil pemeriksaan (Hapsem) II BPK TA 2013 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda), Rabu (11/6) kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPD RI dari Kalbar Erma Suryani Ranik beserta rombongan, perwakilan BPK RI Kalbar, Inspektorat Kalbar, Ketua DPRD Sambas Mas'ud Sulaiman, Wakil Bupati Sambas Pabali Musa, serta Sekretaris

Daerah Sambas Jamiat Akadol. Kunjungan kerja (kunker) Komite IV DPD RI terkait program mereka, mendorong pemerintah daerah mendapatkan opini WTP. Kunker ini dilakukan sejak 9 Juni lalu ke Kabupaten Bengkayang, Sambas, dan Kota Singkawang. Tiga wilayah Singbebas (Singkawang, Bengkayang, dan Sambas) ini dinilai mereka unik, karena merupakan hasil pemerikaran. Tak dipikijika Kabupaten Sambas

◆ Ke Halaman 27 kolom 1

### Aset Hambat Raih WTP

**Sambungan dari halaman 17**  
kemudian melahirkan Kabupaten Bengkayang, kemudian menelurkan Kota Singkawang. "Tiga wilayah ini mempunyai persoalan aset, sehingga sulit meraih WTP" ungkap Erma Makanya, DPD RI berkeinginan menuntaskan masalah ini dengan memfasilitasi ketiga wilayah ini. tentunya, DPD RI menyarankan agar ketiga wilayah ini aktif mengatasi masalah aset bersama pihak provinsi. "Memang tidak soal aset tidak semudah memba-

likkan telapak tangan, tapi ini harus dituntaskan, kita dari DPD siap memfasilitasi dan membantu jika dalam prosesnya ada halangan," katanya. Seperti Sambas sudah meraih WTP di tahun 2007, sayangnya tak bisa dipertahankan dengan berbagai kendala salah satunya masalah aset. WTP ini ukuran nyata kinerja sebuah pemerintah daerah. "Jadi memang kita sedapat mungkin meraih WTP, apalagi adareward dari Kemenkeu Rp 20-25M," katanya. Untuk itu, ia meminta persoalan ini lebih

diintensifkan penuntasannya dengan berkoordinasi dengan provinsi, karena persoalan aset ini terkait alas hak, fisik dan kepemilikan. "Kembalikanlah manayang haknya Sambas, Singkawang dan Bengkayang, meskipun dengan berbagai masalah yang melekat dari persoalan aset ini," jelasnya. Bahkan Erma dan rombongan mengapresiasi upaya Pemkab Sambas menuntaskan masalah aset ini. "Kita melihat performas Sambas memang masalah keuangan dan penyelesaian

aset ini sangat baik," katanya. Hal sama diungkapkan Petris Sihombing selaku Kepala Sub Auditorat 1 -- BPK Perwakilan Kalbar mengatakan selain persoalan internal pengelolaan keuangan oleh masing-masing pemerintah daerah, persoalan aset ini merupakan yang sangat berpengaruh dalam penilaian pengelolaan keuangan daerah. "Masalah aset inilah yang membuat baik Kabupaten Sambas, Singkawang dan Bengkayang ini tak bisa mendapatkan WTP, maka

kita sarankan untuk segera dituntaskan," ujarnya. Pihaknya tentu saja siap membantu bersama Pemkab, dan pemprov mengatasi masalah ini. "Semantara Wakil Bupati Pabali Musa, mengatakan sejak tiga tahun ini pihaknya sudah merencanakan dan merancang

strategi dalam upaya meraih WTP. Makanya ia senantiasa memotivasi seluruh birokrat dari pejabat hingga bawahan untuk membangun persahabatan sejati, kepemimpinan kebersamaan yang menopang dan semangat, serta semangat transparansi yang diutamakan.

danan dan pengyoman yang dijalankan, pemimpin, dan untuk bawahan harus mampu membangun loyalitas kepada atasan dan kedua ciptakan kebersamaan yang menopang dan semangat, serta semangat transparansi yang diutamakan. (nur)